

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Air adalah karunia tuhan yang maha Esa. Manusia dan semua makhluk hidup membutuhkan air. Air merupakan bagian dari sumber daya alam sekaligus juga sebagai bagian dari ekosistem<sup>1</sup>. Masalah air yang berkembang di Yogyakarta saat ini adalah masalah kualitas dan kuantitas air yang tidak memenuhi syarat, yang kedua yaitu banyaknya pertumbuhan dan perpindahan penduduk keperkotaan yang cukup tinggi, ketiga penggunaan lahan yang tidak memperhatikan konservasi tanah dan air.

Pembangunan gedung-gedung dikota banyak yang tidak memenuhi perbandingan lahan terpakai dan lahan yang terbuka, sehingga mengganggu penyerapan air kedalam tanah. Keempat aktivitas domestic, industry, dan pertanian. Eksplorasi air tanah yang berlebihan yang dilakukan oleh gedung-gedung perkantoran, rumah sakit, Mall, apartemen, dan usaha laundry dan bangunan lainnya<sup>2</sup>, juga kerusakan lingkungan sehingga kualitas air permukaan dan air tanah menjadi berkurang. ditambah lagi semakin berkurangnya sumber mata air, yang di lupakan pemerintah (Daerah Istimewa Yogyakarta ) DIY mencari sumber mata air baru, apa bila tidak

---

<sup>1</sup> Robert J. Kodoatie, Ph.D. dan Roestam Sjarief, Ph.D. *pengelolaan sumber dayat air terpadu (C.V ANDI OFFSET) Kata pengantar*

<sup>2</sup> Rohani Budi Prihatin, *jurnal Problem air bersih di perkotaan*

dapat menemukan sumbermata air baru, maka pemerinta DIY dapat menggunakan/mendaur ulang air dari sungai. Sungai yang dipilih adalah sungai progo karenan sungai ini merupakan muara dari Sungai Bebeng, Sungai Blongkeng, Sungai Krasak, dan lain-lain, sehingga dapat diharapkan debit Sungai Progo di musim kemarau masih dapat diambil untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Alternative lain yaitu membeli air bersih dari magelang yang memiliki air lebih.

(Daerah istimewa Yogyakarta) DIY itu sendiri terdiri dari beberapa Kabupaten dan satu kota yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Krisis air di Provensi DIY banyak di alami oleh kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul dan salah satunya kabupaten Bantul

Tabel : 1.1  
Tabel Debit Air

No	kecamatan	Kebutuhan air (m <sup>3</sup> /tahun )							Jumlah	Potensi air (m <sup>3</sup> /tahun	Kekeritisan air	
		DMSK	RS	PBDT	SKL	INDS	PTNI	TNK			Indeks	Keterangan
1	Srandakan	690,332	0	31,208	25,552	29,200	8,045,568	78,824	8,900,702	20,565,569	43	BK
2	Sanden	799,569	0	48,728	34,410	7,300	18,061,056	100,262	19,051,348	53,669,863	35	BK
3	Kretek	709,867	0	41,063	25,399	0	15,002,496	54,699	15,833,549	50,372,013	31	BK
4	Pundong	724,211	0	41,610	35,024	14,600	15,292,800	72,084	16,180,352	54,874,886	29	BK
5	Bambanglipuro	985,347	110	49,275	40,176	7,300	21,596,544	87,891	22,766,664	52,603,881	43	BK
6	Pandak	1,133,654	0	40,515	45,284	14,600	18,330,624	69,304	19,634,004	45,365,663	43	BK
7	Bantul	1,366,889	329	58,583	100,494	73,000	22,156,416	69,984	23,825,715	50,865,868	47	BK
8	Jetis	1,150,079	219	64,058	45,032	29,200	27,267,840	50,352	28,606,803	56,705,594	50	BK
9	Imogiri	1,360,384	0	65,700	55,484	7,300	16,630,272	56,026	18,175,220	78,894,387	23	BK
10	Dlingo	929,217	0	54,750	35,746	7,300	20,056,960	127,621	11,211,651	25,905,259	43	BK
11	Pleret	928,626	110	33,945	52,248	29,200	10,772,352	67,219	11,883,722	43,221,709	27	BK
12	Piyungan	923,370	0	59,678	48,717	43,800	21,876,480	87,412	23,039,489	47,113,661	49	BK
13	Banguntapan	2,000,675	110	89,790	79,957	124,100	27,827,712	44,338	30,166,709	65,998,174	46	BK
14	Sewon	1,797,202	219	73,913	85,706	328,500	27,070,848	43,222	29,399,636	62,939,269	47	BK
15	Kasih	2,029,626	0	79,388	78,068	219,000	13,084,416	70,783	15,561,313	75,035,845	21	BK
16	Pajangan	732,248	0	37,230	28,886	51,100	3,182,976	162,356	4,194,830	9,626,413	43	BK
17	Sedayu	1,034,118	0	46,538	48,421	65,700	16,723,584	45,524	17,963,919	41,506,820	43	BK

Sumber: analisis Studio,2011 olah data manual

Keterangan :

DMKS	: Domestik
RS	: Rumah Sakit
PBDT	: peribadatan
SKL	: Sekolah
INDS	: Industri
PTNI	: Petani
TNK	: Ternak
BK	: Belum Kritis

Dilihat dari table Indeks Kekritisian Air Kabupaten Bantul per Kecamatan, tidak mengalami krisis Air. Sedangkan saat ini Kecamatan Dlingo, Piyungan, Pleret dan Imogiri sedang mengalami krisis air. Dapat kita lihat dari tabel diatas bahwa Kecamatan Dlingo memiliki potensi Air 25,905,259 m<sup>3</sup>/tahun dan jumlah kebutuhan 11,211,651 m<sup>3</sup>/tahun sedangkan indeksnya 43. Kecamatan Piyungan memiliki potensi air 47,113,661 m<sup>3</sup>/tahun dan jumlah kebutuhan 23,039,489 sedangkan indeks 49. Kecamatan Pleret memiliki potensi air 43,221,709 m<sup>3</sup>/tahun dan jumlah kebutuhan 11,883,722 m<sup>3</sup>/tahun sedangkan indeks 27. Kecamatan Imogiri memiliki potensi air 78,894,387 m<sup>3</sup>/tahun dan jumlah kebutuhan 18,175,220 m<sup>3</sup>/tahun sedangkan indeks 23. Indeks kekritisian Kabupaten Bantul per Kecamatan dapat dilihat pada tabel

Tabel : 1.2  
Indeks Kekritisam Air

No	Indeks Kekritisam (IK)	Kategori
1	<50	Belum Kritis
2	50-75	Mendekati Kritis
3	76-100	Keadaan Kritis
4	>100	Telah Kritis

Dilihat dari data diatas bahwa tidak ada kecamatan yang mengalami krisis air tetapi pada kenyataannya dilapangan ada sejumlah kecamatan yang mengalami krisis air. Kabupaten bantul adalah salah satu kabupaten yang saat ini mengalami krisis Air, Pada kenyataannya saat ini Krisis air bersih akibat musim kemarau dirasakan sebanyak 21.150 jiwa warga di Bantul. Mereka yang krisis air berada di wilayah pegunungan dan sebagian lain di daerah pinggiran yang berbatasan dengan kabupaten lain. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bantul Anton Victori mengatakan jumlah jiwa kekurangan air bersih tepatnya berada di wilayah Kecamatan Dlingo, Piyungan, Pleret dan Imogiri. Sebagian lain warga Desa Bangunjiwo di Kecamatan Kasihan, sebagian di Pajangan dan Pandak<sup>3</sup>.

Sehingga kecamatan ini menjadi tempat yang bermaslah dengan kerisis air akibat kemarau yang setiap tahunnya. Sehingga ini menjadi

<sup>3</sup> jiwa-di-bantul-krisis-air-bersih <http://www.solopos.com/2014/10/12/21-150-543494>

masalah yang tidak kunjung dapat diselesaikan pemerintah kabupaten Bantul, jika masalah ini terus berlanjut, maka dampak yang dialami oleh masyarakat kabupaten Bantul yaitu masalah Sosial Ekonomi, dan Kesehatan.

Dari dampak Sosial Ekonomi yaitu sulitnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, masak, mandi, mencuci, kakus (MCK) dan bercocok tanam lain-sebagainya dan mereka harus mengalokasikan dana yang tidak murah untuk mendapatkan kebutuhan pokok, mengingat air merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Contoh kecil misalnya Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri Bantul, sedikitnya 48 hektare tanaman palawija kini kekeringan karena tidak mendapat pengairan. “Tanaman pada mengering karena tidak ada air<sup>4</sup>.

Banyaknya waduk dan sungai yang kering ditambah lagi air yang tercemar oleh limbah pabrik dan tekstil mengakibatkan ikan dan hewan lain mati, sehingga kemarau berkepanjangan membuat hutan mudah terbakar. Dan dampak dari kesehatan masyarakat terancam, berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh krisis air adalah seperti Diare, malaria dan penyakit cacangan. Menurut penelitian WHO, penyakit yang timbul akibat krisis air antara lain kolera, hepatitis, polymeiritis, typhoid, disenterin trachoma, scabies, malaria, yellow fever.<sup>5</sup> Di kabupaten Bantul sendiri penyakit yang banyak ditemui disaat musim kemarau adalah tifus dan diare yang disebabkan debu

---

<sup>4</sup> puluhan-hektare-lahan-pertanian-di-bantul-kekeringan <http://www.boyolalipos.com/2014/-538368>

<sup>5</sup> 30 Penyakit Ini Akibat Krisis Air Bersih <http://www.tempo.co/read/news/2011/09/07/060354927/>  
diakses 11 oktober 2014 jam 01:02

dan lingkungan yang kotor, bakteri Coil adalah bakteri petogen yang menyebabkan penyakit tifus dan diare, dimana air tanah dan air sumur tercemar oleh bakteri ini<sup>6</sup>

Penyebab krisis air dikabupaten Bantul yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap air bersih<sup>7</sup>. Di lain pihak tempat penampungan air sudah berkurang seperti telaga yang berganti menjadi pemukiman<sup>8</sup>. Pembangunan hotel menjadi salah satu penyebab turunya muka air tanah, masalah krisis air karena hotel bukan lah masalah baru, kasus yang serupa sudah dirasakan penduduk Bali<sup>9</sup>. Penggunaan air tanah berlebihan bukan tidak mungkin akan menimbulkan resiko. Disisi lain hotel tidak bias sepenuhnya mangandalkan pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)<sup>10</sup>. Menurut Nelwan, seorang pakar pengairan dari Univesitas Diponogoro jenis usaha yang berpotensi menguras air tanah secara berlebihan adalah industri besar seperti pabrik tekstil, gedung perkantoran, mall, Rumah sakit, dan pengusaha pengusaha laundry<sup>11</sup>. Air memang sumberdaya yang

---

<sup>6</sup> Bosman Batubara, *Jurnal analisis DPSIR terhadap sumber daya air di kota Yogyakarta dan sekitarnya*

<sup>7</sup> Krisna Nur Pribadi dan Putu Oktavia, *jurnal pengelolaan sumber daya air terpadu melalui pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan di cekungan bandung*

<sup>8</sup> Zulkifli Lubis dan Nur Azizah Affandy, *Jurnal kebutuhan air bersih di kecamatan Glagah kabupaten Lamongan*

<sup>9</sup> Bosman Batubara, *Jurnal analisis DPSIR terhadap sumber daya air di kota Yogyakarta dan sekitarnya*

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> *Jurnal, dampak yang ditimbulkan usaha laundry terhadap lingkungan*

dapat di perbaharui, namun secara berangsur ketersediaanya mulai menurun, faktanya berpa wilayah mengalami krisis air.

Penyebab krisis air salah satunya yaitu pengrusakan hutan, penebangan liar (*illegal logging*) secara besar-besaran<sup>12</sup> dampaknya musim penghujan akan menyebabkan banjir, genangan air, tanah longsor, dan di saat musim kemarau akan menyebabkan kekeringan dan pembuangan limbah tekstil dan kotoran manusia secara langsung ke sungai itu pun akan menyebabkan krisis air bersih. Perilaku manusia yang merasa acuh terhadap air, sehingga sungai, danau dan mata air menjadi tempat pembuangan sampah, masyarakat juga masih menganggap air tanggung jawab pemerintah

Yang tidak kalah fenomenal yang saat ini dirasakan seluruh dunia tidak hanya dirasakan kabupaten bantul, yaitu pemanasan global. Akibatnya perubahan musim secara ekstrem. pencemaran udara sebagian besar disebabkan oleh pabrik dan kendaraan yang semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga ini menyebabkan terjadinya krisis air<sup>13</sup>. Ditambah lagi manajemen pengelolaan air yang kurang baik ( kurangnya koordinasi antara institusi terkait, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat ), kerusakan lingkungan dan perilaku manusia itu sendiri.

Berdasarkan DEPkes RI (2002) Air bersih tidak hanya air yang tidak berwarna, tidak berbau dan jernih tetapi air bersih adalah air yang digunakan

---

<sup>12</sup> *Jurnal, krisis air, illegal logging dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia*

<sup>13</sup> *Jurnal pengelolaan sumber daya air guna mendukung pembangunan nasional dalam rangka ketahanan Nasional*

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak terlebih dahulu<sup>14</sup>

Belajar dari kota payakumbuh maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan pemerintah Bantul dalam mengatasi masalah krisis air yaitu pengaturan pemanfaatan air tanah yang disertai dengan pengawasan yang ketat, pemberian surat IMB (izin mendirikan bangunan) harus disertai kewajiban penyediaan lahan terbuka, kewajiban memperbaiki kualitas dan pengembalian tata guna air sesuai pemanfaatan sebagaimana yang telah dimanfaatkan oleh setiap pengguna air, setiap pengguna air harus diwajibkan membiayai pengadaan air bersih, dan setiap pembangunan harus diwajibkan membuat sumur resapan air sehingga dapat meningkatkan cadangan air tanah.

Dengan adanya fenomena diatas, maka pemerintah kabupaten Bantul berusaha untuk menanggulangi krisis air yang terjadi di Bantul. Kebijakan pemerintah kabupaten Bantul dalam menanggulangi masalah krisis Air sangatlah Penting maka pada tahun 2008 Bupati Bantul mengeluarkan Peraturan Bupati (perbub) no 66 tahun 2008 yang mengatur tentang Dinas sumber daya Air sebagai upaya untuk mengatasi masalah krisis air. Dinas sumber daya air adalah tempat untuk menangani masalah krisis air. Tujuan terbentuknya perbub no 66 tahun 2008 yaitu:

---

<sup>14</sup> Mulida Aslamia, *jurnal Evaluasi potensi mata air polaman dan kali biru untuk suplai air bersih penduduk di Kecamatan Lwang Bagian Utara Kabupaten Malang*

1. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Air (Air Irigasi) dan Sumber Daya Mineral
2. melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi di daerah jaringan irigasi
3. melaksanakan penetapan dan pemberian rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi di daerah jaringan irigasi

Dengan adanya Perbub no 66 tahun 2008 pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan mampu mengatasi krisis air.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat dari latar belakang tersebut, maka perlu adanya perumusan masalah agar dapat secara terperinci permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengelola krisis air melalui Perbup No 66 tahun 2008 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Bupati Bantul No 66 tahun 2008 ?

## **C. Tujuan Penelitaian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengatasi krisis air
2. Untuk mengetahui factor yang berpengaruh terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengelolan krisis air

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang tersebut, maka kegunaan dalam penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis, penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu bentuk informasi yang ilmiah bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Krisis Air.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perbaikan kebijakan penanganan krisis air yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

## **E. Kerangka Teori**

### **E.1.1 Kebijakan Publik**

Secara etimologis kebijakan berasal dari kata *Policy*. Kebijakan ( *Policy* ) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.<sup>15</sup>

Jika cita-cita Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai “ tempat tujuan” tersebut.<sup>16</sup> Berikut definisi kebijakan publik menurut para ahli :

---

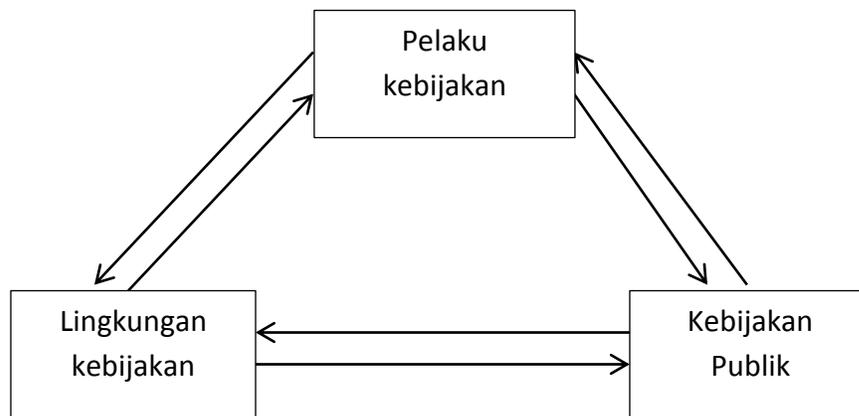
<sup>15</sup> Miriam Buduarjdo, *dasar-dasar ilmu politik* ( PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta 2010 ) hlm 20

<sup>16</sup> Dysta Rilanda, *Efektifitas Kebijakan Pertambangan Di Kabupaten Belitung* (yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ) skripsi tidak diterbitkan

Menurut William N. Dunn analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial tarapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumntasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.<sup>17</sup>

Gambar : 1.3

Model dasar Proses Kebijakan



Sumber : Riant Nugroho (1981)

Mengikuti Dunn, makan metode analisis kebijakan menggabungkan *lima prosedur* umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia yaitu:

1. Definisi: menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan
2. Prediksi: menyediakan informasi mengenai kosekuensi di masa

<sup>17</sup> Riant Nugroho, *Public Policy* (PT Gramedia, Jakarta 2014 ) hlm 266

mendatang dari penerapan alternative kebijakan, termasuk jika telah melakukan sesuatu.

3. Preskripsi: menyediakan informasi mengenai nilai dari konsekuensi alternative kebijakan di masa mendatang.
4. Deskripsi: menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternative kebijakan.
5. Evaluasi: kegunaan alternative kebijakan dalam memecahkan masalah secara visual.

### **Proses Analisis Kebijakan**

**Pertama, merumuskan masalah.** Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan public.<sup>18</sup>

**Kedua, peramalan masa depan kebijakan.** Peramalan atau forecasting adalah prosedur untuk membuat informasi actual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan mengambil tiga bentuk:

1. Peramalan ekstrapolasi, yaitu ramalan yang didasarkan atas ekstrapolasi hari ini ke masa depan, dan produknya disebut proyeksi. Teknik yang dapat dipergunakan antara lain analisis antar waktu, estimasi tren linear, pembobotan eksponensial,

---

<sup>18</sup> Riant Nugroho, *Public Policy* (PT Gramedia, Jakarta 2014) hlm 273

transformasi data, katastrofi metologi. Peramalan ini menggunakan tiga asumsi dasar: persistensi (pola yang diamati di masa lampau akan tetap ditemui di masa depan), keteraturan (visi di masa lalu sebagaimana ditunjukkan oleh kecenderungannya akan terulang secara ajeg di masa depan), dan reliabilitas-validitas data.

2. Peramalan teoritik, yaitu ramalan yang didasarkan kepada suatu teori, dan produknya disebut sebagai prediksi. Teknik
3. yang dapat digunakan antara lain pemetaan teori, model kausal, analisis regresi, estimasi titik dan interval, analisis korelasi. Apabila pada peramalan ekstrapolatif logika *induktif*, maka pada peramalan teoritik mempergunakan logika *deduktif*.
4. Peramalan penilaian pendapat, yaitu ramalan yang didasarkan penilai para ahli atau pakar, dan produknya disebut sebagai perkiraan (*conjecture*). Teknik yang dapat dipergunakan antara lain Delphi kebijakan, analisis dampak silang, penilaian fisibilitas (kelayakan). Teknik peramalan penilaian pendapat (*judgemental forecasting*) berusaha untuk memperoleh dan mensintesis pendapat-pendapat para ahli. Logika yang dipergunakan adalah bersifat *retroduktif* karena analisis dimulai dengan *dugaan* tentang suatu keadaan, dan kemudian berbalik ke data atau asumsi yang dipergunakan untuk mendukung dugaan tersebut. Meski pada prakteknya, ketiga logika tersebut –induktif, deduktif, dan

retroduktif-tidak dipisahkan satu sama lain.<sup>19</sup>

Peramalan mempunyai sejumlah tantangan, yaitu berkenaan dengan isu (1) akurasi ramalan, (2) kondisi komparatif masa depan, dan (3) konteks, yaitu konteks institusional, temporal, historical.

**Ketiga, rekomendasi kebijakan.** Tugas membuat rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan menentukan alternatif yang terbaik dan *mengapa*. Karenanya, prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral. Rekomendasi pada dasarnya adalah pernyataan advokasi, dan advokasi mempunyai empat pertanyaan yang harus dijawab, yaitu apakah pertanyaan advokasi<sup>20</sup>:

1. Dapat ditindaklanjuti (*actionable*)?
2. Bersifat prospektif?
3. Bermuatan “nilai” –selain fakta?
4. Etik?

**Keempat, pemantauan hasil kebijakan.** Pemantauan atau *monitoring* merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik<sup>21</sup>.

**kelima, evaluasi kinerja kebijakan.** Jika pemantauan

---

<sup>19</sup> Ibid hlm 277

<sup>20</sup> Ibid hlm 278

<sup>21</sup> Ibid hlm 280

menekankan kepada pembentukan *premis-premis factual* mengenai kebijakan public, maka evaluasi menekankan kepada penciptaan *premis-premis* nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan: “*Apa perbedaan yang dibuat?*” kriteria untuk *evluasi* diterapkan secara *restrospektif (ex post)*, sementara kriteria untuk *rekomendasi* diterapkan secara *prospektif (ex ante)*.<sup>22</sup>

Tabel : 1.4  
Model Evaluasi

<b>Type Kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?
Efisiensi	Berapa banyak dipergunakan sumberdaya ?
Kecakupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah ?
Pemerataan (equity)	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok target yang berbeda ?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu ?
Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?

Weiner dan vining memahami analisis kebijakan sebagai sebuah kegiatan yang mengandung tiga nilai, pragmatis (clien-oriented), mengacu kepada keputusan (kebijakan) public, tujuannya melebihi kepentingan atau nilai-nilai klien, melainkan kepentingan

---

<sup>22</sup> Ibid hlm 281

atau nilai-nilai sosial.<sup>23</sup>

Menurut Wilter William (1971) bahwa analisis kebijakan adalah sebuah cara pensintesaan informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan suatu format keputusan kebijakan ( yang ditentukan dari sejumlah alternative pilihan ) dan menentukan informasi yang relevan dengan kebijakan ( *policy analysis is a means of synthesizing information incliding research results to produce a format for policy decisions ( the laying out of alternative choiices ) and of determining future needs for policy relevant information*).<sup>24</sup>

Menurut Patton dan Sawicki, Analisis kebijakan public *adalah bagaimana kita dapat mempunyai metode analisis dan perencanaan kebijakan yang sederhana ?* karena proses pemecahan masalah yang rasional tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan analisis kebijakan yang ditekan oleh sempitnya waktu, terbatasnya pengetahuan, dan terbatasnya sumber daya.<sup>25</sup>

---

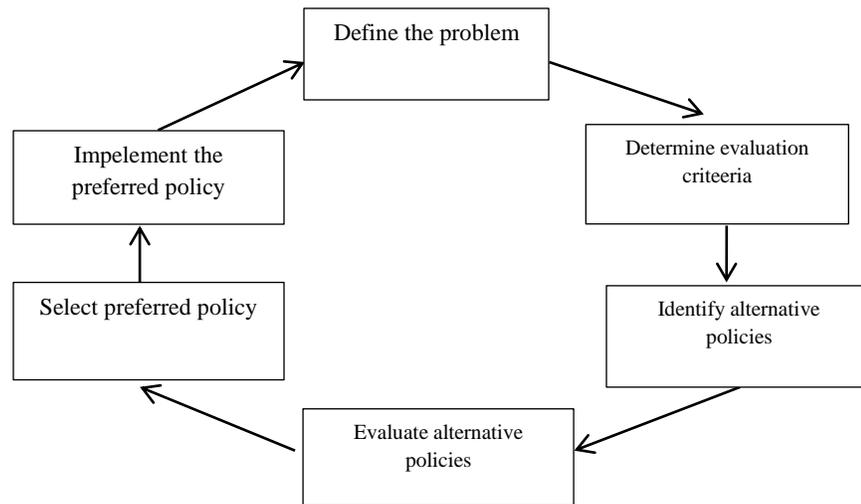
<sup>23</sup> Ibid hlm 287

<sup>24</sup> Ibid hlm 288

<sup>25</sup> Ibid hlm 307

Gambar : 1.5

Proses Kebijakan versi Patton dan Pawicki



Sumber : Riant Nugroho (1981)

Menurut E.S Quade (1975) Analisis Kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum; termasuk penggunaan institusi dan pengungkapan pendapat dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-memilahnnya kedalam sebuah komponen-komponen tetapi juga merancang dan sintesis alternative-alternatif baru.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua* (2003, Gajah Mada University Press) hlm 95

### **E.1.2 Implementasi Kebijakan Publik**

Suatu kebijakan telah melalui tahap pemberlakuan dalam tahap perundang-undangan maka pada tahap selanjutnya diadakan pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Pelaksanaan tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan, maka bagai manapun baiknya sebuah kebijakan baik berupa undang-undang, keputusan Presiden, peraturan Daerah, maupun peraturan Walikota kalau belum ada tindak lanjutnya dalam program maka kebijakan tersebut tidak banyak berarti karena belum memberikan implikasi tertentu kepada masyarakat.

Menurut Ripley dan Franklin implementasi *“is what happens after laws are passed authorizing a program, a policy, a benefit, or some kind of tangible act”*. ini menggambarkan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah perundang-undangan diciptakan yang memberi otoritas antara lain pada kebijakan, program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas<sup>27</sup>.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Soenarko adalah :

1. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat karena ketiga hal ini dapat menimbulkan partisipasi masyarakat yang benar-benar

---

<sup>27</sup> Ahmad Rifki Fauzi, *implementasi kebijakan pemerintah kota Yogyakarta dalam menanggulangi gizi buruk*. skripsi tidak diterbitkan

diperlakukan untuk pelaksanaan kebijaksanaan.

2. Isi dan tujuan kebijaksanaan haruslah dimengerti secara jelas oleh pelaksanaan kebijaksanaan sehingga inteprestasi dan persepdinya tepat, seperti yang dikehendaki oleh pembentuk kebijaksanaan.
3. Pelaksanaan haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai kebijaksanaan itu.
4. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan, pengorganisasian dan koordinasi yang baik serta pengawasan yang efektif
5. Pembagian kekuasaan dan wewenang (*desentralitation*) yang rasional dalam pelaksanaan kebijaksanaan.
6. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijaksanaan.

Hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan apa yang dikemukakan Edward dan Sharkansky :

*The First requirement for effective implementation is that those responsible for carrying out a decision must know what they are supposed to do*". (syarat pertama untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan itu mengetahui betul apa yang harus mereka lakukan seperti yang halnya diharapkan oleh pembentukan untuk

kepentingan masyarakat.<sup>28</sup>

Menurut Wiliam Dunn Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :

- a) Standar dan sasaran kebijakan
- b) Komunikasi antara organisasi dan pengukuran aktivitas
- c) Karakteristik organisasi komunikasi antar politik
- d) Kondisi sosial, ekonomi dan politik
- e) Sumber daya
- f) Sikap pelaksana<sup>29</sup>

Menurut Edwards III (1980), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi public termasuk di dalamnya kebijakan implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipegeruhinya.<sup>30</sup>

Edwards III mengemukakan pendapatnya bahwa empat factor atau variable kritis dalam implementasi kebijakan public yaitu komunikasi (*comunication*), sumber daya (*resource*), disposisis(sikap kecendrungan)/*dispotition* dan struktur birikrasi (*bureaucratis structure*). Adapun secara terperinci Edwards III (1980)

---

<sup>28</sup> Heri Setiawan. *Implementasi kebijakan penguji berkala kendaraan bermotor*. Skripsi tidak diterbitkan

<sup>29</sup> ibid

<sup>30</sup> Dyah Mutiarin dan Arif Zaebudin, *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2014) hlm 38

menjelaskan keempat factor tersebut sebagai berikut :

### 1. Komunikasi

Agar implementasi dapat efektif penanggung jawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan harus jelas, akurat dan konsisten. Dengan demikian dalam factor komunikasi terdapat tiga aspek pokok yaitu: transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), konsistensi (*consistency*).

### 2. Sumber Daya

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara efektif maka dibutuhkan sumberdaya yang cukup. Implementasi kebijakan akan tidak efektif apabila para implementor kekurangan sumberdaya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. *“implementation orders may be accurately transmitted, clear and consistent, but if there is lack of resources, implementation is likely to be ineffective”*. Sumber daya yang penting untuk implementasi kebijakan meliputi staf dengan jumlah yang sesuai dengan keahlian yang memadai dan relevan dengan implementasi kebijakan, kewenangan dan fasilitas.<sup>31</sup>

### 3. Disposisi (Sikap Kecendrungan)

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan

---

<sup>31</sup> Ibid hal 40

tentunya, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian juga sebaliknya apabila sikap-sikap dan perspektif implementor berbeda dari pembuatan keputusan, maka prose pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Beberapa kebijakan masuk kedalam *zona of indifference* dari para administrator. Kebijakan-kebijakan tersebut mungkin merupakan konflik dengan pandangan kebijakan substansi implementor atau kepentingan pribadi/ organisasinya. Dalam hal ini diposisikan menimbulkan hambatan implementasi.<sup>32</sup>

#### 4. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III struktur yang tepat dapat memberikan dukungan kuat terhadap kelancaran implementasi kebijakan. Terdapat dua hal penting dalam struktur birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standard (*Standard Operating Procedures*) dan Fragmentasi

##### (1) *Standard Operating Procedures* (SOP)

SOP dikembangkan sebagai respons internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat

---

<sup>32</sup> Ibid hal 41

rutin didisain untuk situasi tepikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personal baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi. Meskipun SOP dapat menyebabkan masalah-masalah implementasi, namun SOP memiliki kegunaan. Organisasi dengan prosedur perencanaan yang fleksibel dan control yang memadai atas program-program fleksibel dapat lebih beradaptasi terhadap tanggung jawab baru dari pada birokrasi tanpa karakteristik seperti ini.

## (2) Fragmentasi

Edwards III (1980) menyatakan fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Semakin banyak faktor-faktor yang terlibat dalam suatu kebijakan tentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil

keberhasilan implementasi menurut Edwards III.<sup>33</sup>

Menurut model Van Meter dan Van Horn (1975) yang disebut sebagai a Model of policy implementation process (Model impl'entasi kebijakan). Model ini menganggap bahwa implementasi keijakan dipengaruhi oleg dimensi kebijakan,yaitu:

- a) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan
- b) Jangkauan/ lingkup kesepakatan terhadap tujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi akan lebih tinggi jika perubahan yang di kehendaki rlatif seikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoprasikan program dilapangan relative tinggi.

Hal lain yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn (1975) adalah bahwa jalang yang menghubungkan antara kebijakan dan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variable bebas yang saling berkaitan yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Suber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau badan instansi pelaksana
4. Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana
5. Sikap para pelaksana

---

<sup>33</sup> Ibid hlm 41-44

## 6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Menurut Van Meter dan Van Horn ada lima variable yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni, (1) standard dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antara organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

### E.1.3 Pengelolaan Sumber Daya Air

Falkenmark dan Lundqvist (1995) menyatakan bahwa persepsi terhadap penyediaan air bersih sebagai bentuk pelayanan sosial, yaitu sebagai bentuk pelayanan yang wajib disediakan pemerintah dan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menuntut penyediaan dari pemerintah, kemungkinan muncul dari pemahaman bahwa air merupakan prayarat bagi kehidupan<sup>34</sup>.

Hoekstra (1998) mendefinisikan permintaan terhadap air sebagai “ *the volume of water which has to be withdrawn in response to some human purpose*”. Dalam hal ini permintaan terhadap air sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan tingkatan kegiatan perekonomian. Selain itu, juga dipengaruhi oleh berbagai factor antar lain factor-faktor eksternal (seperti iklim), factor teknologi

---

<sup>34</sup> Krisna Nur Pribadi dan Putu Oktavia, *jurnal pengelolaan sumber daya air terpadu melalui pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan di cekungan bandung*

yang dapat membatasi penggunaan air (anton 1993) serta peraturan, misalnya dengan penetapan kuota<sup>35</sup>

Kemampuan untuk menyediakan air bersih, menurut Anton (1993), bergantung pada manajemen sumber daya air yang ada pada system alamiahnya serta pada keefektifan system air artifisial yang berkaitan dengan penggunaan air. Penggunaan air oleh masyarakat mempengaruhi system air alamiah. Dalam banyak kasus, terutama di Negara berkembang, agar dikomunikasi tanpa mempertimbangkan system alamianya sehingga menimbulkan dampak yang biasanya tidak terduga<sup>36</sup>.

Rondinelli (1991) menjelaskan ada 6 (enam) factor yang mempengaruhi kesuksesan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Factor-faktor ini didefinisikan berdasarkan proyek-proyek pengelolaan sumber daya air di Negara-negara berkembang, sebagai berikut :

1. Insentif memadai bagi seluruh pihak yang berpartisipasi atau mengelola system pengelolaan air di masyarakat dan bagi pemerintah untuk menyediakan bantuan teknis bagi masyarakat
2. Keterampilan dan sumber yang memadai untuk terlaksanakannya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air, termasuk dalam

---

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> ibid

manajemen pengelolaan air, harus dikembangkan dan diperkuat.

3. Proses yang efektif dan memadai dalam oprasi dan pemeliharaan system air bersih harus dikembangkan serta dilembagakan dalam masyarakat
4. Hubungan organisasi yang kooperatif harus dikembangkan sehingga baik individu maupun kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan system air bersih. Dalam hal ini pemerintah dapat berperan dalam pemberian bantuan teknis.
5. Teknologi yang efisien dan memadai harus bersedia untuk mendorong masyarakat agar menggunakan air bersih secara efektif
6. Sistem pemantauan, umpan balik, dan evaluasi harus dikembangkan atau diperkuat untuk manjamin pengelolaan air bersih secara efektif dan efisien<sup>37</sup>.

Dalam pemahaman mengenai pengelolaan sumber daya air, perlu diperhatikan maksud kata pengelolaan air dan sumber daya air. Berikut merupakan pengertian sumberdaya air, air dan pengelilaan sumber daya air di dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumberdaya air :

- a. Sumberdaya air merupakan air, sumber air, dan air yang terkandung di dalamnya.

---

<sup>37</sup> ibid

- b. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, maupun dibawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat
- c. Pengelolaan sumberdaya air merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya air rusak.

Air adalah semua yang terdapat pada, di atas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan air tanah, air hujan air laut yang berada di darat

Air permukaan semua air yang terdapat di permukaan tanah. Yang disebut antara lain air yang didalam sistem sungai air didalam system irigasi, air didalam system Drainase, air waduk, danau, kolam retensi

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah <sup>38</sup>

Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Bantul di Dasarkan Pada Perbub Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul

---

<sup>38</sup> Robert J.Kodoatie dan Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Air Terpadu edisi revisi* (2008 ANDI Yogyakarta) hlm 14

Menurut Perbub tersebut tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah

- 1) Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral
- 2) Melaksanakan usaha pencegahan dan pemeliharaan bencana akibat daya rusak air dan pemantauan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- 3) Pengendalian izin pengeboran, penggalian dan pembangunan.<sup>39</sup>

Kemudian kewenangan pengelolaan SDA oleh Pemerintah Kabupaten Bantul meliputi :

- 1) Menyusun program dan rencana kerja dinas sumber daya air
- 2) melaksanakan penetapan dan pemberian rekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah
- 3) melaksanakan pemberdayaan lembaga pemakai air
- 4) menyusun data lembaga P3A/GP3A/IP3A dan lembaga pemakai air lainnya
- 5) menyusun data daerah rawan bencana akibat daya rusak air;
- 6) mengendalikan daya rusak air yang berdampak local
- 7) melaksanakan penelitian pengendalian bencana akibat daya rusak air;

---

<sup>39</sup> Peraturan Bupati bantul no 66 tahun 2008, *Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul*

- 8) melaksanakan usaha pencegahan dan pemulihan bencana akibat daya rusak air;
- 9) melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai
- 10) melaksanakan monitoring, pemanfaatan dan pengumpulan iuran P3A<sup>40</sup>

#### Sumber Dana

Sumber dana kegiatan Dinas Sumber Daya Air diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui SKPD terkait dan sumber-sumber lain yang sah.

#### **F. Kerangka Pemikiran Peneliti**

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variable, yaitu implementasi Perbup no 66 tahun 2008 dan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perbup no 66 tahun 2008. Pada variable implementasi perbup no 66 tahun 2008 merujuk pada perbup itu sendiri yang menjelaskan tentang rincian tugas, fungsi dan tatakerja, yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi program dalam kegiatan konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral
- b. Melaksanakan usaha pencegahan dan pemeliharaan bencana akibat daya rusak air dan pemantauan
- c. Pengendalian izin pengeboran, penggalian dan pembangunan

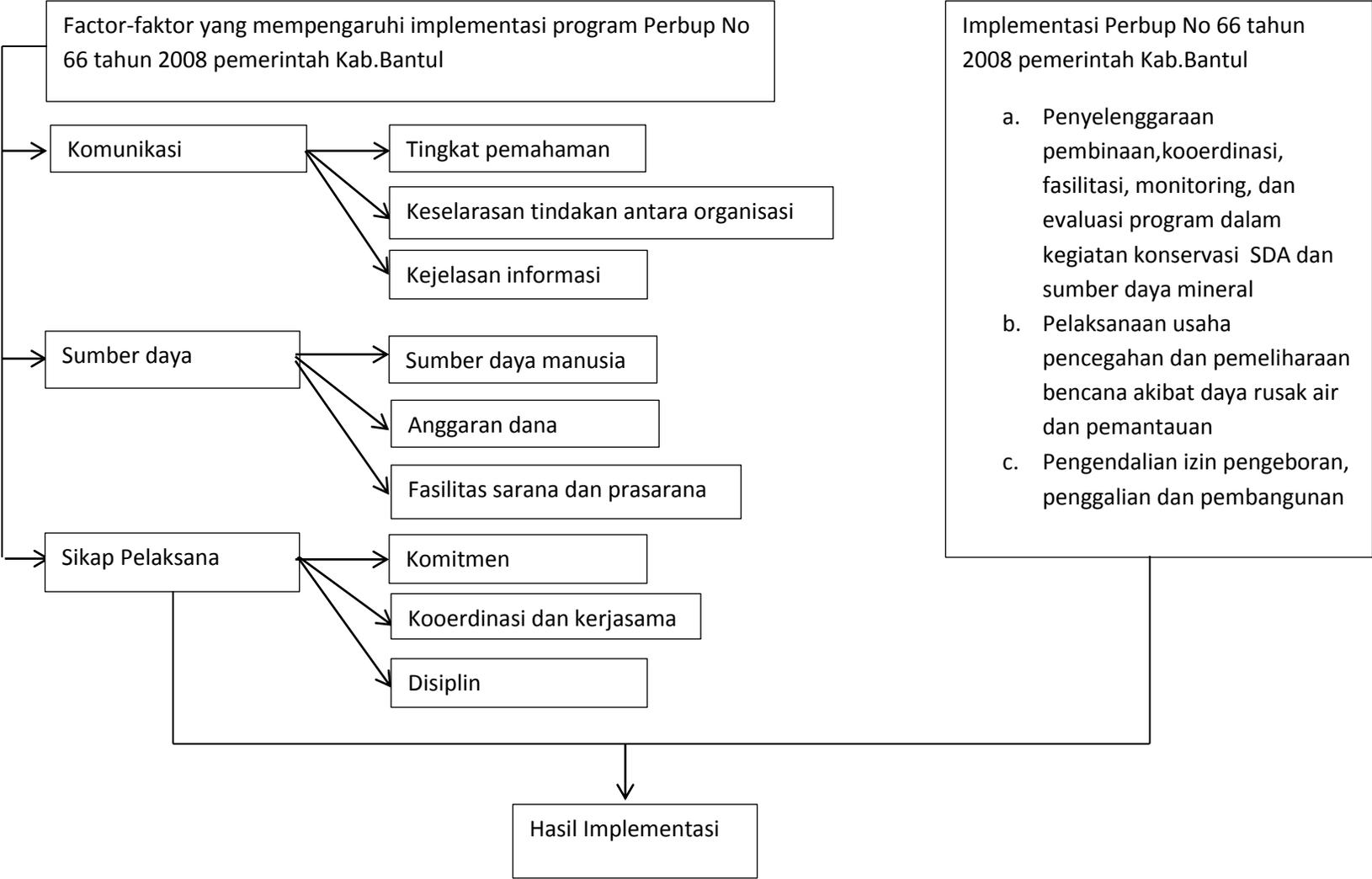
---

<sup>40</sup> Ibid

Dari penjelasan diatas sejauh mana Dinas SDA mengatasi krisis air akibat kemarau dalam system irigasi untuk melayani masyarakat kabupaten Bantul

Sementara itu, pada variabel Faktor-faktor yang mempengaruhi implemntasi Perbup no 66 tahun 2008 merujuk pada teorinya Edward III. Edward III menjelaskan bahwa empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu, komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dari 4 (empat) variable tersebut peneliti hanya akan mengkaji komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana. Dalam parabel ini akan mengidentifikasi sejauh mana factor-faktor implementasi yang dilakukan pemerintah kabupaten bantul dalam menangani krisis air akibat kemarau dalam system irigasi untuk melayani masyarakat yang menggunakan jasa air irigasi

Gambar: 1.6  
 Kerangka Pemikiran Penelitian



## **G. Definisi Konseptual**

Fokus penelitian ini pada konsep Kinerja kebijakan Publik adalah sebagai berikut :

**F.1** Implementasi Kebijakan Pengelolaan SDA adalah suatu tindakan atau pelaksanaan yang sudah disusun secara terperinci oleh pemerintah dalam pengelolaan SDA di Negara berkembang seperti berpartisipasi antara masyarakat dan pemerintah, keterampilan dan sumber yang memadai, proses yang efektif, hubungan antar organisasi, teknologi yang efisien, system pemantauan.

**F.2** Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilakukan oleh Pemda Bantul untuk mengendalikan Sistem dan evektifitas adalah penyediaan sumber daya air irigasi sebagai bentuk pelayanan sosial yang wajib disediakan pemerintah kepada masyarakat yang sudah diatur oleh Pemda daerah tersebut dengan sistem yang sudah diatur dalam Perbub no 66 tahun 2008 dan evektifitas dapat memenuhi kebutuhan konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air atau tersedianya prasarana sumber daya air yang menghubungkan daerah aliran sungai yang satu dengan daerah aliran sungai yang lain.

## **H. Definisi Oprasional**

1. Implementasi Perbup No 66 Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Bantul
  - a. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi program dalam kegiatan konsevasi sumber daya air dan sumber daya mineral
  - b. pelaksanaan usaha pencegahan dan pemeliharaan bencana akibat daya rusak air dan pemantauan
  - c. Pengendalian izin pengeboran, penggalian dan pembangunan
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Perbup No 66 tahun 2008 pemerintah kabupaten Bantul
  1. Komunikasi
    - a) Tingkat pemahaman pelaksana
    - b) Keselarasan tindakan antar organisasi
    - c) Kejelasan informasi
  2. Sumber Daya
    - a) Sumber daya manusia
    - b) Anggaran dana
    - c) Fasilitas sarana dan Pra sarana
  3. Sikap Pelaksana
    - a) Komitmen
    - b) Koordinasi dan kerjasama
    - c) Disiplin
  4. Struktur Birokrasi

## **I. Metode Peneliitian**

### **H.1 Jenis Penelitian**

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>41</sup> Peneliti kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, dan bukan dari laboratorium atau penelitian yang terkontrol .(2) penggalian data dilakukan secara alamiah, bukan kunjungan pada situasi-situasi alamiah subyek.(3) dan untuk memperoleh makna baru dalam bentuk katogori-katagori jawaban, peneliti wajib mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah

### **H. 2 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengabil lokasi di Dinas Sumber Daya Air dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal peneliti dan di Dinas tersebut tersedia data-data yang diperlukan sehingga lebih mudah dalam pelaksanaanya.

---

<sup>41</sup> Syakir, *akselerasi reformasi birokrasi kualitas pelayanan public di DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA tahun 2012*. Skripsi tidak diterbitkan

### H. 3 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

➤ Data Primer

Adalah data yang dapat memberi informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu Dinas Sumber Daya Air. Adapun data primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel :1.7  
Narasumber

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Dinas Sumber Daya Air/Sekertaris</li> <li>• Sub. Bag. Program</li> </ul>	Wawancara mendalam ( <i>indept interview</i> )
Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub.Bag.Keuangan dan Aset</li> </ul>	Wawancara mendalam ( <i>indept interview</i> )
Sikap Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub. Bag. Umum</li> </ul>	Wawancara mendalam ( <i>indept interview</i> )
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Konservasi Sumber Daya Air</li> <li>• Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi</li> </ul>	Wawancara mendalam ( <i>indept interview</i> )

➤ Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara tidak langsung melalaui bahan-bahan dokumen peraturan perundang-undangan, Buku kepustakaan, media massa, internet, makalah dan sebagainya. Data sekunder dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

Tabel : 1.8  
Sumber Data Sekunder

No	Nama Data	Sumber data
1	Renstra Dinas Sumber Daya Air tahun 2011-2015	Dinas Sumber Daya Air Bantul
2	Studi Neraca Air Kabupaten Bantul	Dinas Sumber Daya Air Bantul
3	Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Air	Jurnal

#### H. 4 Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam satu penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang telah

dirumuskan, karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan, data yang dikumpulkan haruslah data yang benar. Agar data yang dikumpulkan baik dan benar, instrument pengumpulan datanya pun harus baik. Instrument pengumpulan data tersebut melalui:

**a. Wawancara**

Dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, maka wawancara menjadi sangat penting. Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep peneliti (atau yang terkait dengannya ) terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian ataupun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian.<sup>42</sup> Dalam proses wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun respondennya kepala Dinas kepala Dinas Sumber daya Air Kabupaten Bantul tentang kinerja kebijakan dan evaluasi Kinerja dinas tersebut dan lain sebagainya yang akan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan cara ini peneliti berusaha untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

---

<sup>42</sup> Syakir, *akselerasi reformasi birokrasi kualitas pelayanan public di DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA tahun 2012*. Skripsi tidak diterbitkan

Tabel : 1.9

## Daftar Narasumber Peneliti

No	Nama Narasumber
1	Kepala Dinas Sumber Daya Air
2	Sub. Bag. Program
3	Sub. Bag. Keuangan dan Aset
4	Sub. Bag. Umum
5	Bidang Konservasi Sumber Daya Air
6	Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Tabel : 1.10

## Pertanyaan

No	Pertanyaan
1	Bagaimana metode pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap penghematan air ? Bentuk pembinaannya seperti apa dan seberapa besar tingkat keberhasilannya ?
2	Bagaimana system koordinasi dalam melakukan pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan masyarakat ?
3	Apa saja fasilitas yang telah dibangun ? Bagaimana ketepatan pembangunan fasilitas terhadap kemudahan akses air bersih ?
4	Seperti apa program kerja Dinas sumber daya air ? Bagaimana sikap masyarakat dalam mengelola air ? Bagaimana menanggapi alih fungsi lahan yang terjadi di Bantul ?
5	Bagaimana perizinan terhadap pengelolaan kawasan resapan air baik dari swasta dan masyarakat ? Bagaimana perizinan terhadap pembangunan dan industry mengingat bahwa kabupaten bantul sering mengalami kekeringan disaat musim kemarau ?
6	Bagaimana Evaluasi lapangan yang sudah berjalan dan maupun yang belum terlaksana ?

## **b. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi ialah cara peneliti untuk memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang berupa gambar, foto dan lampiran dari responden yang mendukung penelitian. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam<sup>43</sup>. Pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen majalah, jurnal, dan kolom dalam media massa yang bermanfaat untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam mengumpulkan berita-berita lisan dan tulisan dari media massa, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipahami sebagai syarat keabsahan data, yaitu sebagai berikut:

- (1) Obejktif, apa adanya.
- (2) Tidak memihak sehingga tidak menyesatkan pengumpul data.
- (3) Mengandung wawasan ilmiah.
- (4) Aktual.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Burhan Bugin. *Penelitian kualitatif* (2008, kencana pranada media group) hlm125

<sup>44</sup> Rizal Khadafi Nasution, *Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2008 Berdasarkan PP No.6 Tahun 2008*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2010), skripsi tidak diterbitkan.

### c. Teknik Analisis Data

Mengingat dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data, maka metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif maka data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak dianalisis menggunakan angka-angka, tetapi melainkan data yang diperoleh akan diklasifikasikan atau dikategorikan dan kemudian dideskripsikan, serta kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan dan kepentingan penelitian. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis data yang bersifat tersistematisasi yang mengenai faktor-faktor atau berhubungan dengan keadaan yang sedang diselidiki tanpa menggunakan hitungan statistik. Artinya setelah memperoleh data baru kemudian ditafsirkan atau dianalisis<sup>45</sup>. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, dijabarkan dengan bentuk kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut katagori untuk mendapatkan kesimpulan. Dengan demikian laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memeberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari neskah-naskah wawancara, catatan laporan, dokumentasi resmi dan sebagainya Mencoba menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai airti permasalahannya bagaimana disajikan oleh situasinya yang terjadi secara urut dan nyata.

---

<sup>45</sup> Lexy j. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitataif*, (Bandung:Pt Remaja Rosdakarya,1989), hlm. 56.

Proses-proses analisis data kualitatif tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
- b) Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dilapangan studi.
- c) Penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Dari proses pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat ketentuan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Jika peneliti masih berlangsung, maka setiap kesimpulan yang ditetakan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid.